



Judul : Masyarakat Jangan Main Hakim Sendiri
Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Kisruh Tambang Ilegal

Masyarakat Jangan Main Hakim Sendiri

ANGGOTA Komisi VII DPR Mulyanto menyesalkan terjadinya bentrok antara masyarakat lokal dengan Warga Negara Asing (WNA) dalam penambangan emas liar di Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (10/8/2024). Pemerintah diminta mengambil tindakan tegas, utamanya kepada WNA pelaku penambangan liar demi menjaga keadilan hukum nasional.

“Pemerintah harus menindak tegas WNA yang menambang emas tanpa izin sekaligus menutup lokasi penambangan ilegal tersebut,” tegas Mulyanto, Rabu (14/8/2024).

Mulyanto menegaskan, kasus penambangan ilegal ini sebenarnya sudah berulang kali terjadi, tapi tidak jelas penindakannya. Akhirnya, kasus penambangan liar terus bermunculan di tempat lain.

“Kali ini kalau pelakunya benar adalah WNA, maka harus ditindak serius oleh Pemerintah. Kalau dibiarkan, di mana keadilan kita sebagai sebuah bangsa atas kekayaan sumber daya alam nasional kita,” katanya.

Politisi PKS ini mendesak agar pelanggaran pidana tambang liar ini diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Sebab, sangat tidak mungkin penambangan ilegal ini bisa beroperasi lama dengan menggunakan alat berat bila tanpa beking di belakangnya.

Karena itu Pemerintah harus berani menindak semua pihak yang terlibat. Pemerintah harus memberikan efek jera agar kasus seperti ini tidak terus berulang.

Mulyanto bilang, bentrok yang terjadi di Sekotong karena masyarakat menganggap Pemerintah tidak tegas dalam menegakkan aturan, sehingga masyarakat mengambil langkah hukum sendiri untuk menertibkan penambangan liar tersebut.

“Tentu kita tidak ingin tatanan hukum porak-poranda dan masyarakat bertindak main hakim sendiri,” wantinya.

Dia pun mengingatkan agar Pemerintah menata Izin Usaha Pertambangan (IUP), sehingga pemilik tambang dapat mengusahakan tambangnya dengan baik. “Kalau terjadi pelanggaran, Pemerintah cabut saja IUP-nya,” desaknya.

Mulyanto lalu menyoroti langkah Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Tambang Ilegal. Rencana ini hanya wacana. Padahal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah lama selesai menyusun draf regulasi satgas ini.

“Ini menandakan Pemerintah tidak serius mengurus tambang yang sesuai konstitusi dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” pungkasnya. ■ KAL